

IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) (Studi Kasus Dinas Pendidikan Kabupaten Malang)

Abdullah Fakih Hilmi Al Huda¹, Sunarivanto², Agus Zainal Abidin³

*Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
E-mail: 21901091030@unisma.ac.id*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian KIP melalui ATM efektif dan dapat mencapai sasaran yang direncanakan. Namun, kendala yang dihadapi adalah keterbatasan kuota penerima KIP, yang mengakibatkan pemerataan KIP kurang merata. Selain itu, minimnya ketersediaan mesin ATM di daerah terpencil juga menjadi kendala dalam penyaluran dana. Penelitian ini merekomendasikan evaluasi terus-menerus terhadap implementasi KIP ATM dan perlunya pengawalan mekanisme pengambilan dan pengajuan.

Kata Kunci: Program Kartu Indonesia Pintar, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, pendistribusian KIP

Pendahuluan

Dalam hal pertumbuhan nasional dan sumber daya manusia berbakat, sistem pendidikan memainkan peran yang sangat penting. Terwujudnya masyarakat yang religius, demokratis, dan bermartabat, memajukan peradaban, dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia merupakan tujuan pendidikan nasional. Pendidikan berkualitas menjadi landasan penting bagi negara untuk menghadapi tantangan masa depan, termasuk persaingan global. Pada tahun 2021, Indonesia mendapatkan peringkat 54 dalam peringkat negara dengan pendidikan terbaik. Namun, masih ada masalah dalam akses pendidikan berkualitas karena kemiskinan. Biaya pendidikan yang mahal dan kurangnya peralatan pendidikan menjadi kendala bagi masyarakat kecil untuk mengakses pendidikan tinggi.

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada seluruh warga negara. Tanggung jawab pendidikan anak ditanggung bersama oleh banyak pihak, baik negara, masyarakat, maupun keluarga. Prioritas pemerintah seharusnya adalah memastikan bahwa setiap orang mempunyai akses terhadap pendidikan berkualitas tinggi, apapun situasi keuangan mereka.

Untuk menjamin seluruh anak di Indonesia mempunyai akses terhadap pendidikan yang berkualitas, pemerintah meluncurkan Program Indonesia Pintar (PIP) yang mencakup Kartu Indonesia Pintar untuk siswa SD dan SMP serta Kartu Indonesia Pintar untuk perguruan tinggi mandiri bagi masyarakat berpendapatan rendah.

Namun, program tersebut menghadapi kendala seperti ketidakakuratan sasaran dan kurangnya data yang memadai untuk pengusulan calon penerima. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan program pendidikan tersebut perlu dilakukan.

Pemerintah daerah, satuan pendidikan, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya diminta untuk bekerja sama dalam mengawal implementasi program PIP dan KIP agar tepat sasaran. Evaluasi terus dilakukan untuk memastikan program-program tersebut berjalan dengan baik dan mencegah putus sekolah atau putus kuliah, serta memberikan kesempatan kepada siswa yang putus sekolah untuk melanjutkan pendidikan. Penerapan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dapat menjadi studi kasus yang menarik dalam hal ini.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kabupaten Malang?
2. Apakah ada hambatan dalam proses distribusi Kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) ?
3. Bagaimana model distribusi Kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis hambatan-hambatan dalam Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP).
3. Untuk mengetahui, Model Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis, dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dibidang Kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan sebagai wacana serta rujukan bagi peneliti selanjutnya yang memiliki tema atau hampir sama dengan penelitian ini.
2. Manfaat Praktis
Manfaat bagi instansi, penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk instansi terkait dalam mengembangkan berbagai inovasi dalam implementasi Kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Manfaat bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat sebagai informasi mengenai implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Manfaat bagi peneliti, sebagai sarana bagi peneliti untuk memperluas dan mengetahui terutama dalam hal-hal implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Tinjauan Pustaka

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terkait menjadi landasan penyelidikan ini. Peneliti sangat bergantung pada manual, manual mentor, dan penelitian yang ada. Evaluasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP oleh Yusup dkk. (2019) dikutip sebagai salah satu penelitian tersebut. Evaluasi dalam penelitian ini didasarkan pada model gap, dan metodologi yang digunakan adalah kualitatif. Evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan antara target PIP SMP Negeri 7 Salatiga dan pedoman pemerintah, namun lembaga tersebut terus mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan untuk mewujudkan rencana tersebut. Kajian ini serupa dengan kajian evaluasi PIP, namun lebih menekankan pada inisiatif untuk mendorong pemerataan pendidikan.

Penelitian Verto (2017) yang mengamati distribusi PIP kepada siswa berpenghasilan rendah di SDN Jrebeng Wetan juga relevan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif meliputi observasi, wawancara dan pencatatan. Penyaluran dana PIP berjalan baik, tetapi pemanfaatannya belum optimal. Guru melaporkan peningkatan prestasi

siswa, meskipun masih ada kendala administratif. Penelitian ini sebanding dengan penelitian ini dalam evaluasi penyaluran PIP, tetapi juga fokus pada upaya pemerataan pendidikan.

Penelitian kedua mengkaji bagaimana kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) diterapkan di Desa Rompegading, Kabupaten Maros, dan ditulis oleh Sartika (2018). Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Meskipun KIP berhasil dilaksanakan, terdapat beberapa kendala. Hal ini termasuk dana yang terlambat atau tidak dialokasikan dengan benar, serta kesulitan dalam mencatat dana tersebut. Penelitian ini sebanding dengan penelitian ini dalam evaluasi penyaluran PIP, tetapi juga fokus pada upaya pemerataan pendidikan.

Penelitian terakhir adalah penelitian Mauliana Sari (2021) tentang implementasi KIP di MTsN 1 Watampone. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Pelaksanaan KIP mendukung upaya pemerataan pendidikan, Mekanisme yang rumit dan kesulitan dalam mengumpulkan bukti pengeluaran hanyalah dua contoh tantangan yang harus diatasi. Serupa dengan evaluasi disalurkan PIP, namun juga melihat kemajuan yang dicapai menuju kesetaraan pendidikan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggabungkan temuan dari penelitian-penelitian terdahulu untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi dan distribusi KIP di Kabupaten Malang. Penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan dalam distribusi dana dan menganalisis model distribusi yang digunakan dalam program tersebut

Program Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan inisiatif pemerintah yang menerbitkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) berisi uang tunai kepada siswa berpenghasilan rendah. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi beban keuangan pada keluarga berpenghasilan rendah sehingga semua anak usia sekolah mereka dapat bersekolah. Inisiatif ini juga berupaya mengurangi ketidakhadiran siswa dan meningkatkan tingkat kehadiran. Peserta Program Keluarga Harapan (PKH), pemegang Kartu Keluarga Bahagia (KKS), anak yatim piatu, korban bencana, dan anak-anak lain yang berusia 6-21 tahun semuanya berhak menerima manfaat PIP.

Untuk dapat mendaftar di sekolah mana pun, baik formal maupun non-formal, seorang siswa harus memperoleh KIP terlebih dahulu. Memiliki KKS atau mengikuti aktif PKH sama-sama menjadi prasyarat. Uang PIP disimpan ke rekening bank atau credit union siswa. Pernyataan dari kepala sekolah dan tanda pengenalan diperlukan sebelum siswa dapat melakukan pembayaran.

Siswa yang diberikan PIP harus menunjukkan tanggung jawab fiskal dalam cara mereka membelanjakan uangnya, mempertahankan prestasi akademik yang memuaskan, dan mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Moleong (2007:4) mendefinisikan metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam menggunakan metode atau jenis penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan atau organisasi tertentu dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, dan komprehensif tentang masalah yang akan diteliti di lapangan. Sehingga dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.

Fokus Penelitian

Peneliti dapat membuat keputusan yang tepat mengenai data mana yang akan dikumpulkan dan data mana yang tidak diperlukan atau dibuang. Yaitu dengan menentukan titik fokus penelitian yang akan diteliti selanjutnya dengan begitu mengarahkan peneliti agar menyaring data-data yang tidak diperlukan, serta memandu jalannya penelitian. Wibawa dkk (1994:9-10) mengemukakan bahwa Implementasi bertujuan untuk mengetahui 4 aspek dimana aspek ini menjadi rentetan penelitian ini yaitu : pertama Proses pembuatan kebijakan, kedua Proses implementasi, ketiga Konsekuensi kebijakan, keempat, Efektivitas dampak kebijakan

Adapun penelitian yang difokuskan Pada Implementasi Distribusi Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang yaitu:

- 1) Kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Program Indonesia Pintar adalah salah satu program nasional (tercantum dalam RPJMN 2015-2019) yang bertujuan untuk : a) meningkatnya tingkat angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah. b) menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan perdesaan, dan antar daerah. c) meningkatnya kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

Dengan fokus pembahasan (pendataan penerimaan bantuan KIP, sosialisasi program kartu Indonesia pintar, pengajuan kuota, evaluasi akhir kinerja dinas pendidikan kabupaten Malang)

- 2) Faktor Penghambat Implementasi Distribusi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang: 1) kurangnya pemahaman masyarakat terkait Program Indonesia Pintar. 2) penyaluran dana yang tidak menyeluruh. 3) Evaluasi program KIP yang dilaksanakan setiap periode program menyebabkan terjadinya perubahan pada mekanismenya.
- 3) Model Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang mengacu pada Teori Ndraha (2005) Implementasi (Proses perbandingan antara standar dengan fakta yang terjadi). Dimana teori ini sesuai dengan objek penelitian dan metode yang dipakai.

Situs dan Latar Penelitian

Lokasi penelitian ini berada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Yang beralamat di Jl. Panarukan No. 1 Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 65163, Email: dispendik@Malangkab.go.id, Wbsite: disdik Kabupaten Malang, telepon: (0341) 393935, 393936, 393937. Faksimile: (0341) 393937.

Sumber Data

Dalam melakukan penelitian perlunya data-data untuk mendukung dalam kegiatan penelitian. Berikut data-data yang peneliti gunakan yaitu data primer dan sekunder.

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama secara langsung yaitu terdiri dari jajaran pengurus dan staf Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, yang berjumlah empat informan karena studi ini meliputi aktor pelaku pelaksana program KIP. Sedangkan sisanya meliputi informasi non kunci sebagai subjek penerima KIP yang peneliti kerucutkan menjadi 4 kategori yang diambil dari pelajar tingkat SMP dan SD.

b) Data sekunder

Data sekunder adalah semua informasi yang diperoleh tidak secara langsung, data yang berasal dari mengutip dari berbagai sumber-sumber lain sehingga tidak bersifat otentik karena diperoleh dari tangan ke dua, ke tiga dan seterusnya, sehingga perlu mengolahnya dan memastikan kembali keabsahannya, data dalam sumber ini juga disebut data pendukung, karna data yang diperoleh peneliti melalui dokumen-dokumen, berita-berita, surat kabar serta sumber lainnya yang berhubungan

dengan bahan yang diteliti pada penelitian ini. Berikut ini adalah data penyaluran dana yang peneliti peroleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten, Malang. Data penyaluran dana KIP Kabupaten Malang dari tahun 2021 sampai tahun 2022 memiliki jumlah penyaluran 87.457 di tingkat sekolah dasar, serta 39.175 pada sekolah menengah pertama, hal ini memberikan perbedaan yang sangat signifikan pada jumlah pemberian relaksasi dana yang sudah terealisasi dari masing-masing tingkat sekolah, maka dengan melihat data penyaluran dana KIP tahun 2021-2022 dapat lebih diperhatikan tingkat penyaluran dana agar tepat sasaran.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara
Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara semi struktur (semi struktur interview). Tujuan dari wawancara semi struktur menurut Sugiono (2013: 233) adalah menentukan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya.
- b. Observasi
Menurut Sugiono (2013:226) menjelaskan bahwa melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi langsung serta menggunakan jenis observasi partisipasi pasif. Menurut Sugiono (2013:227), partisipasi pasif berarti "dalam hal ini peneliti datang di tempat kegiatan badan usaha milik desa dan diamati, tetapi tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut". Dengan observasi langsung peneliti melakukan pengamatan untuk mencari data yang nantinya menjadi salah satu sumber data yang kemudian dapat diolah menjadi bahan analisis.
- c. Dokumentasi
Menurut Sugiono (2013:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan atau karya-karya monumental dari seseorang atau sekelompok orang yang didokumentasikan baik secara langsung atau tidak secara langsung. Sugiyono menjelaskan bahwa hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan menjadi lebih dapat dipercaya apabila didukung oleh adanya dokumen, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan penelitian misalnya, buku-buku, teks, artikel, dan berita media masa serta sumber data yang peneliti gunakan yaitu data primer dan sekunder.

Teknik Analisis Data

Menganalisis data penelitian sangat penting karena memungkinkan peneliti melihat apakah hipotesis mereka benar. Metode analisis data non numerik digunakan dalam penelitian kualitatif yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan informasi dengan melakukan wawancara, observasi, dan pencatatan. Hasilnya sesuai dengan rumusan masalah dan fokus penelitian.

Selanjutnya peneliti akan memampatkan data dengan merangkum catatan lapangan yang paling penting untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hal ini dilakukan untuk menangani data yang besar, kompleks dan rumit. Peneliti dapat melihat dengan jelas dan mengumpulkan data tambahan dengan lebih cepat jika mereka mengompresi data yang ada terlebih dahulu.

Setelah itu informasi disajikan dalam bentuk narasi, tabel, dan gambar. Faktor-faktor apa saja yang membantu dan menghambat pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di wilayah pelayanan Malang diuraikan berdasarkan rumusan masalah. Dokumentasi tertulis digunakan untuk menyajikan informasi ini.

Langkah terakhir adalah verifikasi dan analisis. Temuan-temuan yang disajikan di sini masih bersifat sementara, dan mungkin akan terus berkembang seiring dengan tersedianya lebih banyak data yang mendukung temuan-temuan tersebut. Tujuan verifikasi adalah mengumpulkan bukti yang dapat diandalkan untuk digunakan dalam membuat kesimpulan yang masuk akal. Program layanan KIP di wilayah Malang mengalami beberapa kesulitan dalam implementasinya, dan hal ini merupakan tujuan lain dari inisiatif ini.

Keabsahan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperiksa keakuratannya dengan cermat. Menilai keandalan temuan penelitian memerlukan validasi data yang dikumpulkan. Para peneliti menggunakan berbagai metode dan teknik untuk memperluas dan menyempurnakan temuan mereka. Salah satu teknik yang digunakan adalah triangulasi data. Triangulasi adalah metode untuk memverifikasi keakuratan informasi dengan membandingkan hasil dari beberapa penelitian yang dilakukan pada waktu berbeda dan menggunakan pendekatan berbeda.

Untuk melakukan triangulasi sumber, perlu dilakukan perbandingan data dari beberapa tempat yang berbeda. Peneliti menarik kesimpulan setelah menganalisis data dan kemudian memeriksa konfirmasi dari sumber data lain. Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang menjadi fokus penelitian ini,

dan wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data mengenai permasalahan pelaksanaan program.

Peneliti juga menggunakan metode inspeksi untuk memastikan keakuratan temuan mereka. Ada norma-norma yang ditetapkan yang menjadi landasan teknologi ini. Ada empat metode berbeda yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk memulainya, observasi berkepanjangan dilakukan untuk mengumpulkan data yang lebih luas dan rinci. Kabupaten Batu Putih merupakan tempat dilakukannya berbagai penelitian oleh para peneliti yang tertarik pada efisiensi proses pelayanan administrasi terpadu dan efektivitas petugas pelayanan publik.

Kedua, peningkatan kecermatan dilakukan melalui pengamatan yang lebih cermat dan berkesinambungan terkait efektivitas pelayanan administrasi oleh aparatur di Kecamatan Batu Putih. Peneliti dapat memverifikasi keakuratan temuan mereka dengan meningkatkan tingkat presisi yang mereka terapkan.

Ketiga, gunakan triangulasi dengan mengkonfirmasi informasi yang dikumpulkan sebelumnya dengan sumber tambahan. Triangulasi digunakan dalam penelitian ini dengan membandingkan data yang dikumpulkan pada berbagai titik waktu dan menggunakan berbagai sumber untuk lebih memahami proses pelayanan administrasi aparatur Kabupaten Batu Putih.

Untuk mendukung temuan penelitian, peneliti mengutip sumber sekunder pada langkah keempat. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan keandalan informasi. Foto dan dokumen asli digunakan sebagai sumber penelitian ini. Validitas data juga bergantung pada faktor lain, seperti kemampuan transfer. Untuk membantu orang lain menafsirkan temuan mereka dan mungkin menerapkannya pada populasi yang sesuai, peneliti harus memberikan deskripsi yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Hasil penelitian juga dievaluasi keandalannya. Para ilmuwan di sini berupaya untuk mereplikasi hasil penelitian sebelumnya di bidang yang sama dan dengan metode yang sama

Pembahasan

1). Teori Implementasi George C. Edwards III (1980)

George C. Edwards III telah mengajukan teori untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan hemat energi. Edwards menemukan bahwa komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi merupakan empat faktor terpenting dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Keempat komponen ini saling bergantung dan harus bekerja secara beriringan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pemahaman implementasi kebijakan dengan mengurangi kompleksitas gagasan dan mendekonstruksi gagasan tersebut menjadi bagian-bagian pokoknya.

Proses penerapan suatu kebijakan bersifat dinamis dan bergantung pada sejumlah faktor yang saling terkait. Mereka yang bertanggung jawab melaksanakan arahan kebijakan harus mempunyai pemahaman yang kuat tentang prosedur dan tujuannya. Penting bagi pembuat kebijakan dan pelaksana untuk memiliki pemahaman yang sama mengenai langkah-langkah mendasar dan tujuan kebijakan yang ada. Komunikasi organisasi adalah prosedur multifaset yang memiliki berbagai fungsi, termasuk penyimpanan dan penyebaran informasi.

Penafsirannya akan berbeda-beda karena informasinya berasal dari berbagai sumber. Penting bagi pelaksana kebijakan untuk menerima dan memahami dengan jelas maksud dan tujuan kebijakan. Kurangnya kejelasan dalam spesifikasi kebijakan dapat menyebabkan hasil implementasi yang buruk karena banyaknya pelaksana kebijakan. Selain komunikasi yang jelas dan konsisten, pendanaan yang cukup juga penting untuk melaksanakan inisiatif kebijakan. Personil yang memadai, keahlian implementasi, informasi terkait, dan kepatuhan terhadap sumber daya relevan lainnya semuanya termasuk dalam kategori ini.

Selain itu, sumber daya diperlukan untuk memfasilitasi implementasi kebijakan dan memastikan bahwa proyek dilaksanakan sebagaimana dimaksud. Implementasi suatu kebijakan akan terhambat karena kurangnya komunikasi dengan para pelaksana dan kurangnya sumber daya yang berkualitas

2). Perbandingan Hasil Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Zahimu (2019) berjudul "Evaluasi Program Indonesia Pintar Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Baubau Tahun 2017" Analisis kualitatif deskriptif dilakukan. Kajian menemukan bahwa pada tahun 2017, dari total 9.413 penerima PIP, sebanyak 8.456 orang menerima dana PIP dan 957 orang mengembalikan dana PIP ke pemerintah pusat (Pemerintah Pusat). Program Indonesia Pintar (PIP) diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau. Kematian, ketidakaktifan, atau perpindahan siswa merupakan alasan yang dapat diterima untuk pengembalian dana.

Penelitian sebelumnya dan penelitian ini memiliki tujuan yang sama: menganalisis distribusi PIP, namun berbeda dalam fokus penelitian yang lebih menitikberatkan pada upaya pemerataan pendidikan. Hasil penelitian ini mengkonfirmasi bahwa masih terdapat banyak siswa yang belum terjangkau oleh PIP, dikarenakan kendala realisasi yang kurang maksimal akibat data yang belum terkelola dengan baik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi termasuk kekurangan dana dan keterbatasan stok PIP, sehingga masih banyak siswa di Kabupaten Malang yang belum menerima bantuan tersebut

karena adanya fluktuasi dalam pendataan. Namun, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang telah mengkonfirmasi bahwa upaya sosialisasi pendataan dan pengajuan terus ditingkatkan melalui pelaporan ke pusat dinas pendidikan.

Selain itu, penelitian lain yang dilakukan oleh Mauliana Sari dan Sri Musdalifah (2021) dengan judul "Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan di MTsN 1 Watampone 1 Maulian" juga melakukan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian tersebut mengkonfirmasi bahwa implementasi KIP dapat mendukung upaya pemerataan pendidikan, namun juga menghadapi hambatan seperti mekanisme yang kompleks, penyelewengan dana KIP, dan kesulitan dalam mengumpulkan bukti penggunaan dana KIP.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memiliki persamaan dalam evaluasi penyaluran PIP, namun memiliki perbedaan dalam fokus penelitian yang lebih menekankan pada upaya pemerataan pendidikan. Penelitian ini menunjukkan adanya kendala kuota yang terbatas dan masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam memaksimalkan jangkauan PIP melalui usaha pemerataan yang lebih intensif dan komprehensif

3). Pengembangan Dan Perbandingan

Orang tua yang tidak mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka dapat meringankan sebagian beban keuangan mereka melalui program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP). Dana tersebut dimaksudkan untuk mendorong siswa agar tetap bersekolah dibandingkan putus sekolah. Guna meningkatkan pendataan dan pendistribusian secara adil, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang melakukan evaluasi terhadap program KIP.

Dalam menjalankan kebijakan KIP perlu mengacu pada Peraturan Program Indonesia Pintar Nomor 10 Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Hal ini memastikan kesesuaian teori, teknis, dan undang-undang yang diterapkan di lembaga terkait, sehingga kebijakan KIP dapat terserap dengan baik dan memberikan dampak yang valid dan efektif.

Pengumpulan kasus dan data dari tahun ke tahun penting untuk mengawasi dan menekan angka kemiskinan. Ketegasan dan pengendalian yang baik dalam politik, ekonomi, dan penanganan pelanggaran menjadi kunci bagi bangsa yang kuat. Dalam konteks Kabupaten Malang, pelayanan dan implementasi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan menggambarkan upaya bersama dengan masyarakat dalam melawan kesenjangan sosial, yang merupakan langkah positif yang perlu terus dikembangkan.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendistribusian KIP melalui ATM di kabupaten Malang dinilai sangat efektif terbukti implementasinya terlaksana dengan baik dari tahapan sosialisasi, distribusi dan pemanfaatan dana, sehingga dapat mencapai sasaran yang direncanakan.

Dinas Pendidikan Kabupaten Malang menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaan kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP), diantaranya; keterbatasan kuota penerima manfaat, yang menyebabkan belum semua siswa kurang mampu dapat diakomodasi. Selain itu, dalam konteks pendistribusiannya, terdapat masalah minimnya ketersediaan mesin ATM terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota. Dalam proses pencairan dana KIP dengan Skema buku rekening/ATM juga ditemukan kendala administrasi yang harus dipenuhi penerima manfaat saat mengambil ATM dan buku rekening dari bank.

Adapun model Distribusi Kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di kabupaten Malang, Pertama; Identifikasi Penerima: Proses dimulai dengan mengidentifikasi siswa-siswa yang memenuhi kriteria untuk menerima KIP. Kriteria ini biasanya berdasarkan pada tingkat pendapatan keluarga atau faktor lainnya yang ditentukan oleh pemerintah. Kedua, Pengajuan Permohonan: Calon penerima atau keluarga mereka mengajukan permohonan untuk mendapatkan KIP. Mereka biasanya harus melengkapi formulir dan mengumpulkan dokumen yang diperlukan. Ketiga,

Verifikasi Data: Pihak berwenang melakukan verifikasi data yang diajukan oleh calon penerima untuk memastikan kebenaran informasi yang diberikan. Keempat, Distribusi dana KIP yang diberikan kepada siswa yang memenuhi syarat. Distribusi ini dapat dilakukan melalui sekolah atau perorangan

Saran

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis data yang diperoleh, beberapa hal yang dapat disarankan adalah:

- 1) Kebijakan ini perlu dilanjutkan mengingat hasil yang dilaksanakan memberikan manfaat positif yang dirasakan berbagai pihak. Namun demikian proses update pendataan dan sinkronisasi data harus terus dilakukan agar seluruh siswa miskin yang memang berhak, terutama siswa dari yatim piatu yang tinggal di panti-panti asuhan dapat menerima dana PIP.
- 2) Pencairan dana KIP ATM umumnya dianggap mudah dan cepat, terutama siswa SMP, SMA/ SMK dan Paket B dan Paket C sudah dapat menggunakan sendiri ATM-nya untuk mengambil uang. Namun untuk anak-anak SD dan beberapa anak

- SMP sebaiknya perlu dibantu orang tuanya/ sekolah untuk mencairkan dana.
- 3) Kebijakan dengan menggunakan KIP ATM segera diberlakukan secara keseluruhan, karena model KIP ATM dinilai lebih praktis, tanpa prosedur pencairan yang rumit, kepala sekolah tidak direpotkan, siswa dapat mengambil dana secara utuh, sesuai dengan jumlah yang seharusnya diterima.
 - 4) Pembinaan dari sekolah/dinas/pemerintah kepada siswa/orang tua penerima yang sudah berjalan harus terus dilaksanakan mengingat ini bagian dari sistem pengawasan/monitor yang proporsional terhadap pemanfaatan dana PIP untuk mencegah penggunaan dana tidak sesuai dengan peruntukannya melalui pembinaan sekolah.
 - 5) Pemerintah daerah/Bank Penyalur/Sekolah yang mempunyai potensi perlu mulai membangun kerja sama dengan tempat perbelanjaan baik itu toko dan koperasi sekolah atau merchant yang mempunyai fasilitas EDC ataupun yang belum agar siswa dapat berbelanja sesuai dengan peruntukannya. Diperlukan kemauan dan inovasi dari pimpinan sekolah, lembaga perbankan dan stakeholder daerah dalam menyukseskan implementasi KIP ATM

Daftar Pustaka

- Creswell. (2016). Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed. In Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Dunn, William N. (2003) Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta, Gajah Mada University
- Moleong, Lexy J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mauliana Sari, Sri Musdalifah, E. A. A. (2021). Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan di MTsN 1 Watampone 1Mauliana. Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 3(1), 43–53. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v8i1.422>
- Ndraha, Taliziduhu. (2005). Teori Budaya Organisasi, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Nurcholis, Hanif. (2005). Teori dan Praktik Pemerintahan dan otonomi daerah. Jakarta: PT Gramedia Widiasana.
- Rohaeni, N. E., & Saryono, O. (2018). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan. Journal of Education Management and Administration Review, 2(1), 193–204.
- Solichin, Abdul Wahab. (2004). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono, (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Supeno, Hadi. (1999). Pendidikan dalam Belenggu Kekuasaan. Magelang: Pustaka Paramedia.
- Mauliana Sari, Sri Musdalifah, E. A. A. (2021). Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan di MTsN 1 Watampone 1Mauliana. Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 3(1), 43–53. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v8i1.422>
- Rohaeni, N. E., & Saryono, O. (2018). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan. Journal of Education Management and Administration Review, 2(1), 193–204.
- SARTIKA. (2018). Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Desa Rompegading Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros (dibimbing oleh Musliha Karim dan Muhammad Tahir). ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR.
- Verto, S. (2017). Evaluasi Implementasi Penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) Bagi Siswa Kurang Mampu (Studi pada SDN Jrebeng Wetan Tahun 2016) Verto. 52–56.
- Yusup, W. B., Ismanto, B., & Wasitohadi, W. (2019). Evaluasi Program Indonesia Pintar dalam Peningkatan Akses Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama. Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan, 6(1), 44–53. <https://doi.org/10.24246/j.jk.2019.v6.i1.p44-53>
- Zahimu, H. (2019). Evaluasi Program Indonesia Pintar Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Baubau Tahun 2017. Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan, 2(1), 37–46. <https://doi.org/10.35326/kybernan.v2i1.469>